

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

2025



Pemerintah Kota Batam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Raja Haji No. 03 Telp. (0778) 323429 Fax. (0778) 327794

Email : Dinas_KP2_KotaBatam@yahoo.com

SEKUPANG - BATAM



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1454

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan kondisi berjalan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 yang pelaksanaannya sudah berorientasi hasil dan implementasi seluruh program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam tetap berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil namun dalam rangkap penyelarasan pencapaian target kinerja terhadap kondisi berjalan perlu disusun Rancangan perubahan Rencana Kerja agar target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024.

Semoga Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam.

Batam, 25 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Batam



Novi Harmadyastuti, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT	
 DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	72
3.3 Program dan Kegiatan	74
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	80
BAB. V PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Kinerja dan Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah inas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 2023	7
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	23
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	39
Tabel 2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	47
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan 2025	60
Tabel 3.1.	Identifikasi Kebijakan Nasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	62
Tabel 3.2.	Indikator Kinerja Program Urusan Pangan dan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau	68
Tabel 3.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	73
Tabel 3.4.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025	75
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025	81

BAB I

PENDAHULUAN

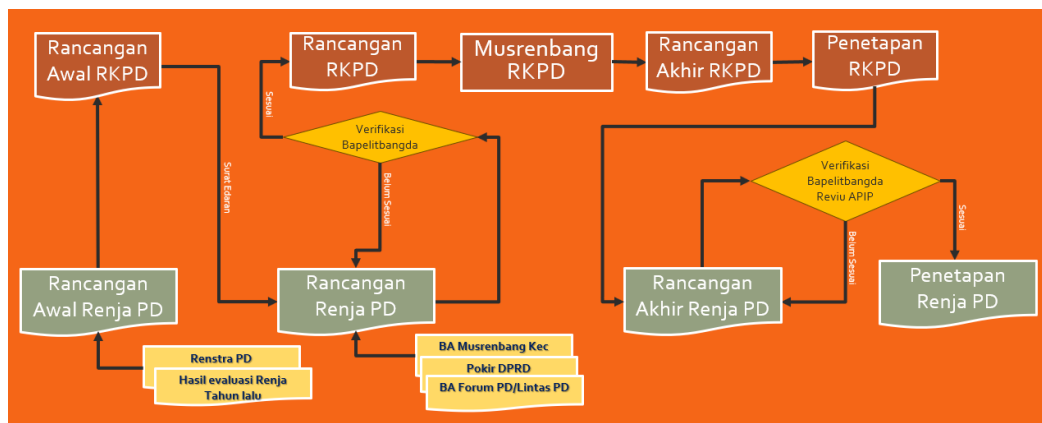
1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke- 3 Yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Skor Pola Pangan Harapan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keenam yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Startegis Kementrian Pertanian Tahun 2020-2024
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC/020/M/05/2020 Tentang Rencana Startegis Kementrian Pertanian Tahun 2020-2024
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024
15. Peraturan Daerah Kota Batam No 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
17. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 219 Tahun 2022 tentang Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam antara lain:

- a) Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2025;
- b) Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
Tahun 2023

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023		
								Target	Realisasi	% Capaian Target	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						13.764.104.372	12.882.763.939	93,60
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.474.160.572	10.841.071.844	94,48
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						11.474.160.572	10.841.071.844	94,48
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	100%	9.919.735.572	9.534.635.344	96,12
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100%	100%	100%	7.859.852.592	7.650.851.577	97,34
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41	45	110%	7.799.392.592	7.590.991.577	97,33
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100%	60.460.000	59.860.000	99,01
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100%	297.767.500	195.239.459	65,57
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	6.210.000	5.898.250	94,98
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100%	104.686.000	92.564.450	88,42
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%	11.212.500	10.319.000	92,03
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	288	288	100%	3.600.000	3.600.000	100,00
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100%	172.059.000	82.857.759	48,16

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023		
										Target	Realisasi	% Capaian Target	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
(1)					(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	100	100%	1.580.655.480	1.518.567.608	96,07
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	1	1	100%	258.965.000	212.438.303	82,03
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1	100%	1.321.690.480	1.306.129.305	98,82
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		%	100%	100%	100%	181.460.000	169.976.700	93,67
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		Unit	16	16	100%	120.930.000	114.706.700	94,85
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	20	20	100%	24.450.000	20.895.000	85,46
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	2	2	100%	36.080.000	34.375.000	95,27
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Ketersediaan Energi		kkal per kapita per hari	2.607	2766	106,10%	1.442.532.000	1.215.223.500	84,24
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase penguatan cadangan pangan Pemda		%	30	10,1	34%	141.400.000	111.120.200	78,59
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Ton	10,1	10,1	100%	141.400.000	111.120.200	78,59
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Kecamatan	12	12	100%	1.301.132.000	1.104.103.300	84,86

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023		
								Target	Realisasi	% Capaian Target	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	100%	1.301.132.000	1.104.103.300	84,86
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan	%	59,4	100	168,35%	35.930.000	15.727.000	43,77
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani	%	7,81	0	0%	35.930.000	15.727.000	43,77
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	35.930.000	15.727.000	43,77
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	%	87	100	115%	75.963.000	75.486.000	99,37
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab	%	43,33	43,33	100%	75.963.000	75.486.000	99,37
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	26	26	100%	75.963.000	75.486.000	99,37
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.289.943.800	2.041.692.095	89,16
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.289.943.800	2.041.692.095	89,16
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	4	3,8	95%	654.145.000	588.603.784	89,98
						Jumlah produksi ternak sapi	ekor	85	35	41%			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Ton	33.603	34880	104%	654.145.000	588.603.784	89,98
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	100%	654.145.000	588.603.784	89,98
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	ton per tahun	256	103	40%	534.627.500	512.750.290	95,91
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH dan RPU	Unit	2	2	100%	534.627.500	512.750.290	95,91

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023		
								Target	Realisasi	% Capaian Target	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	2	100%	534.627.500	512.750.290	95,91
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	%	85%	85%	100%	1.022.617.300	863.083.821	84,40
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	%	85%	85%	100	147.270.000	52.820.000	35,87
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	1	100%	147.270.000	52.820.000	35,87
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas	Kali	1125	1383	123%	875.347.300	810.263.821	92,56
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	12	12	100%	450.310.050	447.929.500	99,47
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	12	100%	425.037.250	362.334.321	85,25
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	%	10	12	120%	78.554.000	77.254.200	98,35
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	%	75	75	100%	78.554.000	77.254.200	98,35
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	1	100%	11.500.000	11.444.800	99,52
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	12	12	100%	67.054.000	65.809.400	98,14

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Indikator Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.919.735.572,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.534.635.344,- (96,11%). Sedangkan Indikator outcome program adalah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.859.852.592,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.650.851.577,- (97,34%). Sedangkan Indikator kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.799.392.592,- realisasinya sebesar Rp. 7.590.991.577,- atau pesentase realisasi belanjanya 97,32%. Sedangkan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target sebanyak 41 orang/bulan dan realisasi sebanyak 45 orang/bulan melebihi target karena ada penambahan pegawai PPPK ditahun 2023.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 60.460.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.860.000,- (99,00%). Sedangkan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target sebanyak 12 dokumen dan realisasi sebanyak 12 dokumen.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 297.767.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.239.459,- (65,56%). Sedangkan indikator kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- (100%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dengan target 288 Dokumen dan realisasi sebanyak 288 Dokumen.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.210.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.898.250,- (94,97%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.212.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.319.00,- (83,54%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket

Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi sebanyak 1 Paket. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja

4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 104.686.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.564.450,- (88,42%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dan realisasi dengan target 6 Paket dan realisasi sebanyak 6 Paket.
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 172.059.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.857.759,- (48,15%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan.

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp 1.580.655.480,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.518.567.608,- (96,07%). Indikator kegiatan adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 258.965.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 212.438.303,- (82,03%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 Laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.321.690.480,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.306.129.305,- (98,08%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 1 Laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 181.460.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 169.976.700,- (93,67%). Indikator kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 24.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.895.000,- (85,46%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan target 20 Unit dan realisasi sebanyak 20 Unit.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 120.930.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.706.700,- (94,55%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan dengan target 16 Unit dan realisasi sebesar 16 Unit.

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 36.080.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 34.375.000,- (95,27%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 2 Unit dan realisasi sebesar 2 Unit.

B. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.442.532.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.215.223.500,- (84,24%). Sedangkannya Indikator Program adalah Ketersediaan Energi dengan target 2.607 kkal per kapita per hari dan realisasi Sebesar 2766 kkal per kapita per hari. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 141.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.120.200,- (78,58 %). Indikator kegiatan adalah Persentase penguatan cadangan pangan Pemda dengan target sebanyak 30% dan realisasi sebanyak 10,1%. Target Persentase penguatan cadangan pangan dikarenakan Ketidak cukupan Gudang Penyimpanan untuk menampung CPPD sehingga jumlah pengadaan cadangan pangan tidak tercapai. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 141.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.120.200,- (78,58%). Indikator sub kegiatan adalah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 10.1 Ton dan realisasi sebanyak 10.1 Ton.

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi PanganPerkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi PanganPerkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.301.132.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.104.103.300,- (84,86%). Indikator kegiatan adalah Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan) dengan target sebanyak 12 Kecamatan dan realisasi sebanyak 12 Kecamatan. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu
 1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.301.132.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.104.103.300,- (84,86%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target sebanyak 1 Laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan.

C. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 35.930.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.727.000,- (43,77%). Indikator Program ini adalah Persentase wilayah aman pangan dengan target sebanyak 59,4% dan realisasi sebanyak 100 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu

a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 35.930.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.727.000,- (43,77%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani dengan target sebanyak 7,81% dan realisasi sebanyak 7,81% Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 35.930.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.727.000,- (43,77%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 1 Dokumen dan realisasi sebanyak 1 Dokumen.

D. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 75.963.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.486.000,- (99,37%). Sedangkan indikator adalah Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) dengan target sebesar 87% dan Realisasi Sebesar 100 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 75.963.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.963.000,- (99,37%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Laboraturium dengan target sebanyak 43,33% dan realisasi sebanyak 43,33 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 75.963.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.963.000,- (99,37%) Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 25 Sertifikat dan realisasi sebanyak 25 Sertifikat.

E. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 654.145.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 588.603.784,- (98,96%). Indikator Program ini terdapat 2 indikator antara lain adalah 1) Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dengan target sebanyak 4% dan realisasi sebanyak 3,8%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan Yaitu:

- a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 654.145.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 588.603.784,- (98,96%). Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dengan target sebanyak 33.603 Ton dan realisasi sebanyak 34.880 Ton. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu

1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 654.145.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 588.603.784,- (98,96%). Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan target sebanyak 1 Laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan.

F. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 534.627.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 512.750.290,- (95,90%). Sedangkan indikator adalah Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun) dengan target sebesar 256 ton dan Realisasi Sebesar 103 ton. Tak tercapai target indikator karena Sejak merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa wilayah Indonesia dan Merujuk Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor : 01/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak dimana pada bagian E poin 2d yang berbunyi “Melakukan pelarangan pengeluaran dan/atau pemasukan hewan, produk hewan, dan atau media yang dimungkinkan membawa PMK dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas. Sehingga pulau Batam terjadi kelangkaan ternak potong yang selama ini dipasok dari pulau Sumatera, hal tersebut menyebabkan menurun drastisnya pemotongan di RPH. Pemotongan hanya sebatas ternak lokal yang ada dan tentunya tidak bias memenuhi kebutuhan pasar kota Batam. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 534.627.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 512.750.290,- (95,90%). Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Pemotongan Hewan di RPU dan RPH realisasi sebanyak 2 Unit. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 534.627.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 512.750.290,- (95,90%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara dengan target sebanyak 2 Unit dan realisasi sebanyak 2 Unit. Tak tercapai Target Indikator karena Gedung pemotongan hewan atau rumah potong unggas, dibangun tahun 2014, tetap dilakukan pemeliharaan tetapi belum beroperasi terkait belum memadai peralatan yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan belum ada ketersediaan sumber daya manusia.

G. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.022.617.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 863.083.821,- (84,34%). Indikator Program ini adalah Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%) dengan target sebanyak 90% dan realisasi sebanyak 90%. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Rp. 147.270.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.820.000,- (35,86%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji dengan target sebanyak 85% dan realisasi sebanyak 85%. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis berupa masukan dana pada Tahun 2022 sebesar Rp. 147.270.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.820.000,- (79,43%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Wilayah

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dengan target sebanyak 1 Laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan.

b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 875.347.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 810.263.821,- (92,56%). Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas dengan target sebanyak 1125 kali dan realisasi sebanyak 1383 kali Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 450.310.050,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 447.929.500,- (99,92%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Pelayanan Jasa Laboratorium dengan target sebanyak 12 Laporan dan realisasi sebanyak 12 Laporan.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner berupa masukan dana pada Tahun 2022 sebesar Rp. 425.037.250,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 362.334.321,- (85,24%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan target sebanyak 12 Laporan dan realisasi sebanyak 12 Laporan.

H. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penyuluhan Pertanian berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp 78.554.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.254.200,- (90,15%). Sedangkan Indikator adalah outcome Persentase Peningkatan

Kelembagaan Kelompok Tani dengan Target 10 % dan realisasi sebesar 12 %. Program Penyuluh Pertanian terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 147.812.550,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.512.550,- (98,34%). Sedangkan Indikator adalah outcome Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan dengan Target 75 % dan realisasi sebesar 75 %. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu:

1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian berupa masukan dana pada Tahun 2022 sebesar Rp. 140.712.550,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 140.412.550,- (99,79%). Sedangkan Indikatornya adalah outcome Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target 12 Unit dan realisasi sebesar 12 Unit.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian berupa masukan dana pada Tahun 2022 sebesar Rp. 11.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.444.800,- (99,52%). Sedangkan Indikatornya adalah outcome Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target 1 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peranjgkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Batam

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (Data 2023)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					UR USAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	100%	48 Orang/Bulan	51 Orang/Bulan	100
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	5 Paket	6 Paket	100
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan		4 Unit			100%			100
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (Data 2023)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	288 Dokumen	288 Dokumen	288 Dokumen	100%	2 Dokumen	288 Dokumen	100
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100
2	09	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	09	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	15 Unit	0 Unit	50
2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100
2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100	100	100%	100%	100	100
2	09	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 unit	3 unit	16 unit	16 unit	100%	3 unit	16 unit	100
2	09	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	26 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100
2	09	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (Data 2023)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	2.610	2691	2.610	2.766	100%	2.608	2.766	99
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat	153	154,37	152,20	-	100%	152,60	154,37	9900%
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	100%	1 Laporan	1 Laporan	100
2	09	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	100%	2 Laporan	2 Laporan	100
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda	50	12,15	30	10,10	100%	40	22,25	45
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 ton	12,15	10 ,1 ton	10,1 ton	100%	40 ton	22,25ton	45
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	12 kecamatan	12 kecamatan	12 kecamatan	12 kecamatan	100%	12 kecamatan	12 kecamatan	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (Data 2023)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah peserta yang mengikuti LCM B2SA dan Demo Masak B2SA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan	70	78,13	59,40	100	100%	62,50	100	142,86
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun	100	100	0	0	100%	100	100	100
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani	3,13	0	59,40	100	100%	6,25	100	100
2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	0	0 Laporan	0 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	90	100	87	100	100%	88	100	111,11

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (Data 2023)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	05	2,01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab	90	41,7	43,33	43,33	100%	45	43,33	48,14
2	09	05	2,01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60 Sertifikat	25 Sertifikat	26 Sertifikat	26 Sertifikat	100%	29 Sertifikat	51 Sertifikat	85,0
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27			URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	4	3,73	4	3,80	100%	4	3,80	95
					persentase peningkatan produksi produksi peternakan (Ternak Sapi)	20	40 ekor	85	35		95	35	175
3	27	02	2,01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	37.799	32.381,37	33.603	34.880	100%	34.947	34.880	92,28
3	27	02	2,01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	1 Laporan	100,00
3	27	02	2,01 03	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100%	0	2 Laporan	66,67
3	27	02	2,05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	20	40 Ekor	0	0	100%	15	40	200

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (Data 2023)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	02	2,05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	24 Ton	0 ton	0 Ton	0 Ton	100%	24 Ton	0 Ton	0,0
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	292 ton	50,86 ton	256 Ton	103 ton	100%	266 ton	103 ton	35,27
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH dan RPU	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2Unit	100%	2 Unit	2Unit	100
3	27	03	2,02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	1 Unit	#VALUE!
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	10%	10%	10%	12%	100%	10%	12%	100
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	100%	60%	75%	75%	100%	80%	75%	75,00
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100
3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	5 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	15 Unit	0	0 Unit	0 Unit	100%	15 Unit	0 Unit	0
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	100	50	85	85	100%	90,00	85	85

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (Data 2023)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	04	2,01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	100,00	85	85	85	100%	90	85	85
3	27	04	2,01	01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3	27	04	2,03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas	1.350	2.398 kali	1125	1383	100%	1200	1383	102,44
3	27	04	2,03	01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00
3	27	04	2,03	02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00
3	27	04	2,04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	77	15	0	0	100%	31	15	19,48
3	27	04	2,04	01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 9.760.248.885,- dengan Indikator Kegiatan Persentase Administras. Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Adapun kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 9.760.248.885,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 51 Orang/bulan.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 67.531.000,- dengan Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100%. Adapun Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 sub kegiatan;

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 3.504.000,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 Paket.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 37.321.000,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebesar 5 Paket.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 4.780.000,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebesar 1 Paket.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 1.800.000,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan sebesar 2 Dokumen.
 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 20.126.000,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 1 laporan.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 1.233.968.100,- dengan Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%. Adapun kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan;
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 238.652.400,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 Laporan.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 995.315.700,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 1 laporan.

- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2023 Perubahan adalah sebesar Rp 157.630.000,- dengan Indikator Kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dengan target 100%. Adapun Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan;

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 150.580.000,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 3 unit.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 5.550.000,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan target 20 Unit.

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 2 Unit.

B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 83.606.000,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun) dengan target 152.6 Kg/kap ita/tahun Adapun Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan

Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 83.606.000,- dengan indikator Sub Kegiatan Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen.

b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 95.330.700,- dengan indikator kegiatan Persentase penguatan cadangan pangan Pemda Target 40%. Adapun kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 95.330.700,- dengan Indikator kegiatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target 5.6 Ton.

c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 900.396.600,- dengan indikator kegiatan Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan) dengan target 12 Kecamatan. Adapun kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 900.396.600,- dengan Indikator kegiatan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal dengan target 1 laporan.

C. Program Penangan Kerawanan Pangan.

- a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 22.420.000,- dengan indikator kegiatan Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani dengan target 6.25%. Adapun kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan:
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2023 Perubahan adalah sebesar Rp 22.420.000,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah dengan target 12 Dokumen.
- b. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 67.592.000,- dengan indikator kegiatan Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun target 100%. Adapun kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dari 1 sub kegiatan:
 1. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 67.592.000,- dengan indikator kegiatan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan dengan target 12 Dokumen.

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 55.434.200,- dengan Indikator kegiatan Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/jumlah sampel yang

dengan target 45%). Adapun Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan.

1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 55.434.200,- dengan indikator Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 60 Sertifikasi

E. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

- a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 1.999.046.047,- dengan indikator kegiatan Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dengan target 34.947 Ton. Adapun Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp.1.999.046.047,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan target 12 Laporan.

- b. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 9.620.000,- dengan indikator kegiatan Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor) dengan target 15 Ekor. Adapun Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 9.620.000,- dengan indicator kegiatan Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dengan target 1 Laporan.

F. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 207.576.114,- dengan indikator kegiatan Jumlah RPH yang dipelihara dengan target 2 unit. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 207.576.114,- dengan Indikator Kegiatan Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara dengan target 2 Unit.

G. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 33.680.292,- dengan indikator kegiatan Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji dengan target 90%. Adapun kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dari 1 sub kegiatan;

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 33.680.292,- dengan indikator kegiatan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan dengan target 6 Wilayah

b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 708.216.100,- dengan indikator kegiatan Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan /produk asal hewan di UPTD Puskesmas

dengan target 1200 kali. Adapun kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 420.058.300,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dengan target 12 laporan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 288.157.800,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan target 12 laporan.

H. Program Penyuluh Pertanian.

- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2023 Perubahan adalah sebesar Rp. 272.690.000,- dengan indikator kegiatan Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan dengan target 80%. Adapun kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dari 2 sub kegiatan;
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 272.690.000,- dengan indikator kegiatan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 200 Unit.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dibentuk pada Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 10 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sedangkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tertuang dalam Peraturan Walikota Batam Nomor : 10 Tahun 2022.

Secara umum kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan dan penyuluh. Dukungan dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam terhadap program sangat besar, dan partisipasi dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Program dan kegiatan dibuat melalui proses perencanaan yang terkoordinir dan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku atau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			87.2	87.6	87.9	88.2	91.5	90.5	87.9	88.2	
2	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi			86.0	87.0	88.0	89.0	80.0	100	88.0	89.0	
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)			152.2	152.4	152.6	152.8	152.2	154.52	152.6	152.8	
4	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)			3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	3.8	4.0	4.0	
5	Persentase peningkatan produksi ternak sapi			16	21	18	22	16.0	22	18	22	
6	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil			80	85	90	95	80.0	85	90	95	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi di Indonesia juga terjadi di Kota Batam, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan. Isu-isu strategis tersebut antara lain laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, legalitas lahan pertanian, regulasi/kelembagaan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung pada beras. Tidak sebandingnya hasil produksi pertanian dan peternakan dengan jumlah penduduk Kota Batam sehingga diperlukan peningkatan hasil pertanian dan peternakan dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada (Intensifikasi Pertanian) dan meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan peternakan yang sebelumnya di manfaatkan sebagai lahan pertanian (Ekstensifikasi Pertanian).

Untuk melakukan intensifikasi pertanian dan peternakan perlu dilakukan penguatan kelompok petani dan peternak yang dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian melalui pembinaan dan sosialisasi tentang teknologi budidaya pertanian dan peternakan, serta pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian dan peternakan. Ekstensifikasi Pertanian perlu melakukan pemusatan kawasan lahan pertanian dan peternakan terpadu.

Adapun permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ketahanan Pangan

- a) Program ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang belum terintegrasi dengan baik.
- b) Belum terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kota Batam sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- c) Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang menghambat akses fisik dan memicu kenaikan harga.
- d) Ketersediaan Pangan , antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
- e) Sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional yang belum efisien,
- f) Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).

- g) Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi.
- h) hasil produksi pangan belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk
- i) Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, diversifikasi pangan dan keamanan pangan.

2. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh

- a) Kurangnya SDM Penyuluh lapangan untuk pertanian dan peternakan
- b) Terbatasnya sarana pendukung sistem penyuluhan,
- c) Keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh petani
- d) Rendahnya pengetahuan/ pemahaman petani dan peternak tentang budidaya tanaman
- e) Lambatnya dalam pendistribusian pupuk ke lokasi sentra produksi.

3. Bidang Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan:

- a) Ketidakpastian status lahan yang dikelola terutama di kawasan Bonded Area.
- b) Rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan karena teknologi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil masih belum optimal.
- c) Status lahan yang belum jelas untuk pengembangan budidaya pertanian/ peternakan sangat berpengaruh terhadap penataan usaha pertanian / peternakan.
- d) Belum maksimalnya pelayanan dan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Rumah Potong Hewan (RPH).
- e) Belum maksimalnya pengawasan Pertanian dan Peternakan.
- f) Masih Kurangnya SDM petugas Pertanian dan Peternakan.
- g) Masih kurangnya pemanfaatan pulau-pulau / wilayah pesisir Kota.
- h) Batam sebagai diversifikasi usaha peternakan.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia sebesar 2100 (dua ribu seratus) kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi. Rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya (sesuai Perpres 22 tahun 2009) dijadikan target capaian tahun 2015. Capaian keberhasilan Skor PPH Konsumsi tahun 2023 yaitu sebesar 91,5 dari target 87,2.

Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk pada tahun 2022 di tingkat rumah tangga (menurut SUSENAS tahun 2020) dengan aplikasi baru yaitu Harmonisasi Analisis PPH Berdasarkan Data Susenas yang digunakan untuk AKE 2150 Kkal/Kap/hari. Kualitas konsumsi pangan penduduk (berdasarkan nilai skor PPH pada tahun 2023 sebesar 91,5 Kondisi aktual di Kota Batam tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan di Kota Batam dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor.

2. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan bahkan dalam era reformasi diharapkan untuk berperan di garis depan dalam mengatasi krisis ekonomi. Secara intern sebagian terbesar petani Indonesia masih petani subsistem dengan segala keterbatasan mereka, khususnya dalam bidang penguasaan teknologi pertanian yang modern. Secara ektern sektor pertanian Indonesia kurang mendapat perhatian pemerintah dalam

pengembangannya secara menyeluruh apabila dibandingkan dengan perhatian pemerintah kepada sektor industri.

Dalam era baru pertanian, penyuluh lapangan harus dituntut untuk memiliki fungsi paling tidak dalam tiga hal yaitu transfer teknologi (technology transfer), fasilitasi (facilitation) dan penasehat (advisory work). Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, penyuluh pertanian lapangan juga harus menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kelembagaan penyuluh pertanian mempunyai peranan strategis dalam membangun pertanian khususnya dalam mengembangkan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. Melalui peran penyuluh diharapkan masyarakat pertanian sebagai pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, teknologi dan sumber daya yang dimiliki sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan. Sehingga dapat terwujudnya sistem pelatihan pertanian yang kredibel yang berbasis sistem manajemen mutu sesuai kebutuhan petani sehingga memiliki daya saing tinggi.

3. Bidang Pertanian

Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama penunjang kebutuhan Pangan Nasional. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan yang dikonsumsi masyarakat, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen produk hortikultura yang dihasilkan petani, merupakan pasar yang sangat potensial, dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan kebutuhan yang semakin meningkat dalam jumlah dan persyaratan mutu yang diinginkan.

Komoditas hortikultura juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga usaha agribisnis hortikultura (buah, sayur, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus

meningkat. Pasokan produk hortikultura nasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, baik melalui pasar tradisional, pasar modern, maupun pasar luar negeri (ekspor). Usaha agribisnis hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) merupakan sumber pendapatan dan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat petani skala kecil, menengah dan besar dengan keunggulan berupa nilai jualnya yang tinggi dan jenisnya yang beragam. Produk hortikultura dalam negeri saat ini telah mampu memasok kebutuhan konsumen dalam negeri melalui pasar tradisional dan pasar modern serta pasar luar negeri. Ketersediaan sumberdaya hayati yang berupa jenis tanaman dan varietas yang banyak dan ketersediaan sumberdaya lahan, apabila dikelola secara optimal akan menjadi sumber kegiatan usaha ekonomi yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan. Kondisi ini ternyata belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pembangunan subsektor hortikultura.

Untuk mencapai apa yang telah diprogramkan perlu adanya langkah –langkah:

- a) Melakukan penguatan modal usaha pertanian.
- b) Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis.
- c) Meningkatkan sarana produksi Pertanian
- d) Melakukan pengawasan hasil produk pertanian
- e) Meningkatkan perluasan areal usaha tani
- f) Meningkatkan kualitas hasil pertanian

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam upaya mengurangi kesenjangan antara kemampuan produksi lokal Kota Batam dengan kebutuhan pangan asal ternak sesuai norma gizi, maka diharapkan adanya peningkatan produksi, terutama untuk daging sapi dan telur untuk mengimbangi angka kebutuhan konsumsi daging dan telur yang meningkat seiring dengan pertambahan penduduk Kota Batam Untuk meningkatkan produksi ternak harus juga didukung oleh peningkatan sarana prasarana produksinya maupun sarana prasarana pelayanan yang mendukung terhadap peningkatan produksi.

Disamping itu secara fisik, pangan asal hewan harus memenuhi kriteria layak dan aman untuk dikonsumsi, namun secara mikrobiologis pun harus terjamin keamanannya, yaitu melalui pendekatan indikator kandungan mikroba maksimal dan ada tidaknya residu antibiotik pada bahan pangan tersebut.

Pelaku usaha pengolahan hasil peternakan diharapkan dapat difasilitasi baik sarana prasarana produksinya, pemasarannya maupun pembinaan teknisnya, sehingga kualitas dan kuantitas produk olahan meningkat. Diharapkan juga adanya penambahan jenis produk olahan peternakan andalan yang secara signifikan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan pendapatan peternak.

Untuk mendukung kelancaran tata niaga ternak perlu didukung oleh tersedianya sarana pasar produksi ternak (pasar ternak) yang memadai. Tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) yang representatif 1 (unit) pada tahun 2012 untuk menunjang keamanan pangan asal ternak yang memenuhi azas Aman, Utuh, Sehat dan Halal (ASUH) dan pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) di sekitar pasar-pasar tradisional (pasar basah) di Kota Batam. Pada tahun 2025 diharapkan terjadi peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi peternakan harus didukung dengan kegiatan masing-masing seksi sebagai berikut :

- a. Pembibitan dan Produksi Ternak, dengan kegiatan :
 1. Pembibitan dan perawatan ternak
 2. Pengembangan usaha peternakan
 3. Penanganan dan pengamanan ternak bantuan pemerintah
 4. Pengembangan kemitraan usaha peternakan
 5. Pembangunan sarana prasarana pembibitan ternak dan HMT
 6. Penyelamatan sapi betina produktif
 7. Optimalisasi Inseminasi Buatan.
 8. Pembangunan sarana penampungan dan pengolahan Biogas.
- b. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
 1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dan hewan peliharaan
 2. Pengembangan dan peningkatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
 3. Peningkatan pelayanan Puskesmas
 4. Pembangunan Rumah Potong Hewan
 5. Pembangunan Rumah Potong Unggas
- c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, dengan kegiatan:
 - 1) Pengembangan produk olahan asal ternak
 - 2) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pasar peternakan

- 3) Pengadaan pasar ternak
- 4) Pembangunan sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan
- 5) Peningkatan sarana prasarana kios daging dipasar tradisional.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Batam

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.245.945.878	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.354.454.946
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				14.245.945.878	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				13.354.454.946
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam	100%	12.353.399.712	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kota Batam	100%	12.581.099.146
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	9.747.726.270	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	10.206.585.524
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	50 Orang/ Bulan	9.741.647.331	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	51 Orang/ Bulan	10.206.585.524
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	6.078.939	2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	257.421.130	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	257.632.463
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	8.881.051	2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	8.878.000
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Paket	107.621.999	2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Paket	107.622.000
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	20.709.743	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	20.664.000
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	3.866.463	2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	3.866.463
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	1 Laporan	116.341.874	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	1 Laporan	116.602.000
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	285.157.022	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	574.387.079
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	10 Unit	285.157.022	2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	25 Unit	574.387.079

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	1.704.190.856	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	1.137.604.080
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	232.142.443	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	199.560.000
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	1.472.048.413	2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	938.044.080
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	358.904.434	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	404.890.000
						2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	44.040.000
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Batam	3 Unit	112.750.359	2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Batam	3 Unit	121.220.000
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	20 Unit	22.339.564	2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	20 Unit	21.230.000
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	223.814.511	2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	218.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	Kota Batam	2609	1.552.754.102	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)	Kota Batam	2609	681.978.600
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	Kota Batam	153	264.537.816	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	Kota Batam	0	0
2.09.03.2.01.01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Batam	1 Laporan	190.150.732	2.09.03.2.01.01	PPenyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Batam	0	0
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Batam	2 Laporan	74.387.084	2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Batam	0	0
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)	Kota Batam	45	388.216.286	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)	Kota Batam	45 Ton	170.000.000
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	45 Ton	388.216.286	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	45 Ton	170.000.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	Kota Batam	12 kecamatan	900.000.000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	Kota Batam	12 kecamatan	511.978.600
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Batam	1 Laporan	900.000.000	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Batam	1 Laporan	511.978.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)	Kota Batam	66,00	240.362.958	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)	Kota Batam	66,00	34.270.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun	Kota Batam	100	111.131.276	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun	Kota Batam	100	0
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kota Batam	1 Dokumen	111.131.276	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kota Batam	1 Dokumen	0
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani	Kota Batam	3	129.231.682	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani	Kota Batam	3	34.270.000
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	48.367.299	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	0	0
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	80.864.383	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	34.270.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	Kota Batam	89	99.429.106	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	Kota Batam	89	57.107.200
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab	Kota Batam	89	99.429.106	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab	Kota Batam	46,67	57.107.200
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	60 Sertifikat	99.429.106	2.09.05.2.01.02	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	60 Sertifikat	57.107.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Kota Batam		10.110.889.999	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Kota Batam		4.845.647.158
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Kota Batam		10.110.889.999	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Kota Batam		4.845.647.158
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dan Jumlah produksi ternak sapi	Kota Batam	4 % dan 110 Ekor	6.374.241.704	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dan Jumlah produksi ternak sapi	Kota Batam	4 % dan 110 Ekor	4.058.996.863
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Kota Batam	36.345	2.966.881.704	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Kota Batam	36.345	3.367.500.863
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Batam	3 Laporan	250.000.000	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Batam	0	0
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Batam	1 Laporan	2.716.881.704	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Batam	1 Laporan	3.367.500.863
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Kota Batam	20	3.407.360.000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Kota Batam	20	691.496.000
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kota Batam	1 Laporan	3.407.360.000	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kota Batam	1 Laporan	691.496.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	Kota Batam	282ton	1.750.000.000						
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH dan RPU	Kota Batam	2 Unit	1.750.000.000						
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Batam	2 Unit	1.750.000.000						
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	Kota Batam	95	1.136.648.295	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	Kota Batam	95	186.648.295
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	Kota Batam	95	124.204.937	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)	Kota Batam	95	124.204.937
3.27.04.2.01.01	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Kota Batam	6 Wilayah	124.204.937	3.27.04.2.01.01	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Kota Batam	6 Wilayah	124.204.937

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas	Kota Batam	1275	950.000.000						
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Batam	12 Laporan	500.000.000						
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Batam	12 Laporan	450.000.000						
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	Kota Batam	62	62.443.358	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	Kota Batam	62	62.443.358
3.27.04.2.04.01	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Kota Batam	15 Unit	62.443.358	3.27.04.2.04.01	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Kota Batam	15 Unit	62.443.358
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	Kota Batam	10%	850.000.000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	Kota Batam	10%	600.002.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	Kota Batam	90%	850.000.000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	Kota Batam	90%	600.002.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	1 Unit	250.000.000	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	1 Unit	0
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	12 Unit	500.000.000	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	12 Unit	600.002.000

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Rancangan Awal dengan pagu Rp 12.353.399.712 pada Rancangan Akhir menjadi Rp 12.581.099.146 terjadi penambahan anggaran sebanyak Rp 227.699.434. Terjadi beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang penambahan anggaran serta pengurangan anggaran dikarenakan efisiensi anggaran. Kegiatan dan Sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu akibat pengurangan dan penambahan pengefisiensi anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Rancangan awal Rp 9.747.726.270 pada rancangan akhir Rp 10.206.585.524 penambahan sebanyak Rp 458.859.254 ini disebabkan terjadi penambahan pagu pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 464.938.193 dikarenakan target indikartor Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/ Bulan Menjadi 51 Orang/bulan.

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rancangan awal Pagu 285.157.022 pada Rancangan Akhir Pagu Rp 574.387.079 Terdapat Penambahan Rp 289.230.057. Penambahan terjadi pada sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebanyak Rp 289.230.057 dikarenakan penambahan jumlah unit pengadaan barang semula 10 unit menjadi 25 Unit.

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada rancangan awal Rp. 1.472.048.413 pada rancangan akhir menjadi Rp. 938.044.080 terjadi pengurangan sebesar Rp. 566.586.776. terjadi pengurangan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 534.004.333 dikarenakan pengurangan beberapa tenaga honor yang lulus sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berkurang Rp 32.582.443.

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu rancangan awal Rp 358.904.434 pagu rancangan akhir Rp 404.890.000 Penambahan sebanyak Rp 45.985.566 terjadi penambahan sub kegiatan baru yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pagu sebesar Rp. 44.040.000. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan terjadi penambahan dan pengurangan penyesuaian harga dengan SSH.

B. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Rancangan Awal Rp 1.552.754.102 pada rancangan akhir Rp. 681.978.600 pengurangan Rp 870.775.502 terjadi karena ada kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada 2025 yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kegiatan dan sub kegiatan yang berkurang yaitu pada kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota pagu rancangan awal Rp 388.216.286 pada pagu rancangan akhir Rp 170.000.000 pengurangan sebesar Rp. 218.216.286. dan pada kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi pada rancangan awal Rp. 900.000.000 pada rancangan akhir Rp. 511.978.600 pengurangan Rp. 388.021.400 dikarenakan pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dikurangkan karena kegiatan perkarangan pangan lestari dipindahkan ke sub kegiatan lain di bidang Pertanian.

C. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Program Penanganan Kerawanan Pangan pada rancangan awal Rp 240.362.958 pada rancangan akhir Rp. 34.270.000 terjadi pengurangan pagu sebesar Rp 206.092.958

dikarenakan ada kegiatan dan subkegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2025 dan kegiatan dan sub kegiatan yang di kurangkan. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2025 adalah Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. Kegiatan yang dikurangkan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota pada rancangan awal Rp. 129.231.682 pada rancangan akhir Rp. 34.270.000 pengurangan sebesar Rp. 94.961.682.

D. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Program Pengawasan Keamanan Pangan rancangan awal pagu sebesar Rp. 99.429.106 pada rancangan akhir Rp. 57.107.200 terjadi pengurangan Rp 42.321.906 dikarenakan efisiensi anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 42.321.906

E. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pagu rancangan awal sebesar Rp. 6.374.241.704 pada rancangan akhir Rp. 4.058.996.863 pengurangan sebesar Rp. 2.315.244.841 karena terjadi pengurangan pada kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebesar Rp. 2.715.864.000 dikarenakan pengadaan bibit sapi tahun 2025 tidak diadakan hanya pendampingan peternak dan pengadaan bibit pakan ternak sapi. Penambah terjadi pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sebesar Rp. 400.619.159 dikarenakan perpindah anggaran kegiatan pangan perkarangan lestari.

F. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tidak terjadi perubahan pagu

G. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program Penyuluhan Pertanian ini pagu pada rancangan awal Rp. 850.000.000 pada rancangan akhir 600.002.000 terjadi pengurangan sebesar Rp. 249.998.000 dikarenakan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa pada tahun 2025 tidak dilaksanakan dan penambahan pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa sebesar Rp 100.002.000.

H. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian tidak terjadi perubahan anggaran dari rancangan awal hingga rancangan akhir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024 yang berasal dari masyarakat melalui tahapan Mesrenbang dari tingkat keluarahan sampai tingkat Kota dan usulan pikir DPRD Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

OPD: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PROGRAM/K EGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARA N VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				
I	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
1	Pendampingan Penggunaan	Kec. Sekupang	Pengadaan Bibit Tanaman Untuk KWT	2 Paket	Pokir Dewan

	Sarana Pendukung Pertanian	Kel. Batu Merah, Kec. Batu Ampar, Kota Batam	Pengadaan Bibit Tanaman Untuk KWT (1 Paket)	1 Paket	Pokir Dewan
		Kecamatan Sekupang	Pengadaan Bibit Tanaman Sayuran / Hortikultura 5 Paket	5 Paket	Pokir Dewan
		Kelompok Tani Se - Kecamatan Sei Beduk	potong rumput 2pcs/mesin rotari 3 pcs/pupuk /sancin/mini teler	5 Paket	Pokir Dewan
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		Pulau Karas Kec.Galang Kel.Pulau Karas, Kota Batam	Perkembangan Pertanian 2 Paket	2 Paket	Pokir Dewan
		Galang Baru Kec.Galang Kel.Galang Baru,	Perkembangan Pertanian 1 Paket	1 Peket	Pokir Dewan
		Sagulung, Kota Batam	Pengadaan Hand Traktor, 5 Unit	5 Unit	Pokir Dewan
		Sagulung, Kota Batam	Pengadaan Pupuk Organik, Padat, dan Super Aktif, 100 paket	1 Unit	Pokir Dewan

		Perum. Kavling Plus Rt 05 / Rw 07 / Se - Kecamatan Sekupang	Pupuk Taman Hias/Petani Sayur . (Volume = 5 Ton Pupuk)	5 Ton	Pokir Dewan
--	--	---	--	-------	-------------

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

NO	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KET
1	2	3	4
	Visi: “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Misi: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Kementrian Pertanian	

	Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan; 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian; 4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian; 5. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2020-2024 adalah : a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja : 1. peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja : 2. pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional 3. persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja : 4. persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional 5. persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan		
--	--	--	--

	d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja : 6. persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan 7. teknologi yang diterapkan oleh pertanian e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja : 8. indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan 9. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan f. Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja : 10. persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani 11. persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis 12. persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja : 13. persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 14. persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian h. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja :		
--	---	--	--

	15. nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian i. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja : 16. nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian		
2	Visi Badan Pangan Nasional Visi Badan Pangan Nasional mempunyai 2022-2024 yakni: <i>“ Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan ”</i> Misi Badan Pangan Nasional Untuk mencapai visi, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu : 1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan; 2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen ; 3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi ; 4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; 5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang; 6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya. Tujuan Badan Pangan Nasional Tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut :	Badan Pangan Nasional	

	1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan; 2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.		
--	---	--	--

2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

a. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan)
2. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

b. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan
2. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 .	Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultural, peternakan, dan perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku		PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga berlaku	Miliar Rupiah	2,168	2,177	2,173	2,181	2,186	2,191	2,196
		Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan tahun berjalan dikurangi jumlah produktivitas tahun lalu dibagi jumlah produktivitas tahun yang lalu kali 100%	%	-4,5	1,29	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Jumlah Produktivitas hortikultura tahun berjalan dikurangi jumlah produktivitas tahun lalu dibagi jumlah produktivitas tahun yang lalu kali 100%	%	-2,6	0,52	0,74	0,77	0,80	0,94	1,03

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan		%	1,40	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8
			Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Penambahan Populasi dibagi jumlah populasi kali 100	%	1,10	1,10	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40
			Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Jumlah hewan Sembuh dibagi Jumlah Hewan yang di obati dikali 100%	%	60	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00
			Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah sampel Produk Pangan Asal Hewan Aman dan Sehat dibagi jumlah sampel di uji kali 100%	%	67,5	58,17	58,50	59,00	60,00	61,00	62,00
			Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	Jumlah areal yang dikendalikan dibagi luas areal serangan kali 100	%	37,50	37,5	38,0	39,5	42,0	43,5	45,0
			Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	Jumlah areal yang dikendalikan dibagi luas areal serangan kali 100	%	52,23	62,40	72,50	73,60	73,90	74,60	74,80

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Jumlah areal yang dikendalikan dibagi luas areal serangan kali 100	%	15	20	20	20	20	20	20
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib)	%	99,84	99,84	99,88	99,91	99,95	99,98	99,99
			Persentase Penyuluh yang meningkatkan Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kompetensi dibagi jumlah penyuluh pertanian kali 100	%	40	40	42	45	48	51	56
2.	Meningkatkan ketahanan pangan daerah		indeks Ketahanan Pangan		Indeks	62,70	62,75	62,80	62,81	62,82	62,83	62,84
		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Skor PPH Konsumsi	Skor PPH Kelompok padi - padian + umbi - umbian + + skor PPH kelompok lain - lain	skor	85,40	86,4	86,90	87,70	88,50	89,30	90,10
			Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	Persentase angka kecukupan tingkat energi dibagi angka kecukupan tingkat konsumsi x 100	%	111	111	113	114	115	116	117

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Standar deviasi komoditas beras nilai rata-rata harga beras kali 100	%	11,70	10	11	11	11	11	11
			Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Jumlah daerah rentan terhadap kerawanan pangan di bagi jumlah kecamatan se-kepri di kali 100	%	10	10	10	10	10	10	10
			Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Sample produk pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sample yang diambil kali 100	%	94	80	81	82	83	84	85
3 .	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Skor	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Skor	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan dinas. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut: **Meningkatkan kualitas ketahanan pangan masyarakat dan kesehatan masyarakat veteriner Kota Batam.**

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan;
3. Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.

Tabel. 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas ketahanan pangan masyarakat dan kesehatan masyarakat veteriner Kota Batam		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86.9	87.2	87.6	87.9	88.2	88.5
		Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	85	86	87	88	89	90
			Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	152	152.2	152.4	152.6	152.8	153
		Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	3.0	3.5	4	4	4	4
			Persentase peningkatan produksi ternak sapi	8	16	21	18	22	20
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	75	80	85	90	95	100

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan tahun 2025 merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026 yang secara simultan telah diubah sebagai tindak lanjut atas Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang. Prioritas Pembangunan diterjemahkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan Program Pembangunan Adapun Rumusan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.4 Untuk Tahun Anggaran 2025 sudah mengacu pada hasil download dari SIPD RI.

Tabel 3.4									
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025									
Kota Batam									
OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				18.200.102.104				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.354.454.946				14.787.136.608
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				13.354.454.946				14.787.136.608
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kota Batam	100%	12.581.099.146	APBD		100%	12.856.535.921
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	10.206.585.524	APBD		100%	10.151.064.186
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	51 Orang/ Bulan	10.206.585.524	APBD		51 Orang/ Bulan	10.144.752.423
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	0	APBD		12 Dokumen	6.311.763
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	257.632.463	APBD		100%	267.280.359
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	8.878.000	APBD		1 Paket	9.221.195
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Paket	107.622.000	APBD		5 Paket	111.743.921
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	20.664.000	APBD		1 Paket	21.502.926
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	3.866.463	APBD		2 Dokumen	4.014.549
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	1 Laporan	116.602.000	APBD		1 Laporan	120.797.768
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	574.387.079	APBD		100%	296.078.536
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	25 Unit	574.387.079	APBD		10 Unit	296.078.536
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	1.137.604.080	APBD		100%	1.769.461.365

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	199.560.000	APBD		1 Laporan	241.033.498
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	938.044.080	APBD		1 Laporan	1.528.427.867
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	404.890.000	APBD		100%	372.651.475
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	44.040.000				
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	3 Unit	121.220.000	APBD		3 Unit	117.068.698
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	20 Unit	21.230.000	APBD		20 Unit	23.196.170
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	218.400.000	APBD		2 Unit	232.386.607
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)	Kota Batam	2609	681.978.600	APBD		2610	1.577.734.587
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	Kota Batam	152,8	0	APBD		153	274.669.614
2.09.03.2.01.01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Batam	0	0	APBD		1 Laporan	197.433.505
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Batam	0	0	APBD		2 Laporan	77.236.109
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlah cadangan pangan pemda per 100 ton x 100%)	Kota Batam	45	170.000.000	APBD		50	403.064.973
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	45 Ton	170.000.000	APBD		50 Ton	403.064.973
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	Kota Batam	12 kecamatan	511.978.600	APBD		12 kecamatan	900.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Batam	1 Laporan	511.978.600	APBD		1 Laporan	900.000.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)	Kota Batam	66,00	34.270.000	APBD		70,00	249.568.859
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun	Kota Batam	100	0	APBD		100	115.387.604
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kota Batam	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	115.387.604
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)	Kota Batam	3	34.270.000	APBD		3	134.181.255
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kota Batam	0 Laporan	0	APBD		2 Laporan	50.219.766
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	34.270.000	APBD		1 Dokumen	83.961.489
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) (jumlah sampel pangan aman yang diuji / sampel pangan yang diuji x 100%)	Kota Batam	89	57.107.200	APBD		90	103.297.241
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)	Kota Batam	89	57.107.200	APBD		90	103.297.241
2.09.05.2.01.02	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	60 Sertifikat	57.107.200	APBD		60 Sertifikat	103.297.241
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Kota Batam		4.845.647.158	APBD			11.155.462.798
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Kota Batam		4.845.647.158	APBD			11.155.462.798
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dan Jumlah produksi ternak sapi	Kota Batam	4 % dan 110 Ekor	4.058.996.863	APBD		4 % dan 120 Ekor	7.011.665.874
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Kota Batam	36.345	3.367.500.863	APBD		37.799	3.263.569.874

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Batam	0 Laporan	0	APBD		3 Laporan	300.000.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Batam	1 Laporan	3.367.500.863	APBD		1 Laporan	2.963.569.874
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Kota Batam	20	691.496.000	APBD		20	3.748.096.000
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Kota Batam	1 Laporan	691.496.000	APBD		1 Laporan	3.748.096.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	Kota Batam	95	186.648.295	APBD		100	1.193.796.924
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)	Kota Batam	95	124.204.937	APBD		100	128.961.985
3.27.04.2.01.01	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Kota Batam	6 Wilayah	124.204.937	APBD		6 Wilayah	128.961.985
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	Kota Batam	62	62.443.358	APBD		77	64.834.939
3.27.04.2.04.01	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Kota Batam	15 Unit Usaha	62.443.358	APBD		12 Laporan	64.834.939
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	Kota Batam	10%	600.002.000	APBD		10%	950.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	Kota Batam	90%	600.002.000	APBD		100%	950.000.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	0 Unit	0			1 Unit	300.000.000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	12 Unit	600.002.000			12 Unit	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Kota Batam	0 Unit	0			15 Unit	100.000.000
UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS					1.750.933.400				2.000.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.750.933.400				2.000.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	Kota Batam	282ton	1.750.933.400	APBD		292ton	2.000.000.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah RPH yang dipelihara	Kota Batam	2 Unit	1.750.933.400	APBD		2 Unit	2.000.000.000
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Batam	2 Unit	1.750.933.400	APBD		2 Unit	2.000.000.000
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN					1.005.800.373				1.000.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.005.800.373				1.000.000.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)			1.005.800.373				1.000.000.000
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas	Kota Batam	1275	1.005.800.373	APBD		1275	1.000.000.000
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Batam	12 Laporan	355.840.273	APBD		12 Laporan	500.000.000
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Batam	12 Laporan	649.960.100	APBD		12 Laporan	500.000.000
Jumlah					20.956.835.877				

BAB IV

RANCANGAN RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rancangan Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan Rancangan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan merata, berkeadilan dan berkesinambungan

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Adapun Rancangan Akhir Renja berdasarkan program dan kegiatan, Indikator, pagu indikatif.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						18.200.102.104,00							25.842.599.406,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.354.454.946,00							14.787.136.608,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						13.354.454.946,00							14.787.136.608,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	12.581.099.146,00						100 %	12.856.535.921,00	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	10.206.585.524,00			-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	10.151.064.186,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	10.206.585.524,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		10.144.752.423,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		6.311.763,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	257.632.463,00			-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	267.280.359,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.878.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		9.221.195,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	107.622.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		111.743.921,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		21.502.926,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.866.463,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		4.014.549,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	116.602.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		120.797.768,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	574.387.079,00			-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	296.078.536,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	574.387.079,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		296.078.536,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	1.137.604.080,00			-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	1.769.461.365,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	199.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		241.033.498,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	938.044.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		1.528.427.867,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			100 %	404.890.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	-	-	372.651.475,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	44.040.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	121.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		117.068.698,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	21.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		23.196.170,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	218.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		232.386.607,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	2,609.00 kkal per kapita per hari			2,609.00 kkal per kapita per hari	681.978.600,00						2,609.00 kkal per kapita per hari	1.577.734.587,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	-			152.8 Kg/kapita/tahun	0,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	274.669.614,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				0 Laporan	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		77.236.109,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		197.433.505,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlah cadangan pangan pemda per 100 ton x 100%)	-			45 Ton	170.000.000,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	403.064.973,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				45 Ton	170.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		403.064.973,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	-			12 Kecamatan	511.978.600,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	511.978.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan	65.63 %			65.63 %	34.270.000,00						65.63 %	249.568.859,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun</i>	-			100 %	0,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	115.387.604,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		115.387.604,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)</i>	-			3.13 %	34.270.000,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	134.181.255,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	34.270.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		83.961.489,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>				0 Laporan	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		50.219.766,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<i>Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)</i>	89 %			89 %	57.107.200,00						89 %	103.297.241,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)</i>	-			46.67 %	57.107.200,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	103.297.241,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>				60 Dokumen	57.107.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		103.297.241,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.845.647.158,00							11.055.462.798,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.845.647.158,00							11.055.462.798,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi ternak sapi Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	505 ekor 22.5 % 4 % 505 ekor 4 % 22.5 %			20 Ekor 4 %	4.058.996.863,00						120 ekor 4 % 120 ekor 4 % 4 %	7.011.665.874,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	-			36345 Ton	3.367.500.863,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	3.263.569.874,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0 Laporan	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	3.367.500.863,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		2.963.569.874,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	-			20 Ekor	691.496.000,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	3.748.096.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	691.496.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		3.748.096.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	282 ton per tahun			282 ton per tahun	0,00						282 ton per tahun	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah RPH yang dipelihara	-			2 Unit	0,00			-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	95 %			95 %	186.648.295,00						95 %	1.193.796.924,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)	-			95 %	124.204.937,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	128.961.985,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				6 Wilayah	124.204.937,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		128.961.985,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas	-			1275 Kali	0,00			-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi</i>	-			62 %	62.443.358,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	-	-	64.834.939,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
			<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi</i>				15 Unit Usaha	62.443.358,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	-		64.834.939,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani</i>	10 %			10 %	600.002.000,00						10 %	850.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan</i>	-			90 %	600.002.000,00			-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	-	-	850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				0 Unit	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	600.002.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	-		550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS						1.750.933.400,00							2.000.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.750.933.400,00							2.000.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.750.933.400,00							2.000.000.000,00	
1.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	1.750.933.400,00						-	2.000.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.750.933.400,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	-	-	2.000.000.000,00	UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				2 Unit	1.750.933.400,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	-		2.000.000.000,00	UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS
		UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN						1.005.800.373,00							500.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.005.800.373,00							500.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.005.800.373,00							500.000.000,00	
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	1.005.800.373,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.005.800.373,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	-	-	500.000.000,00	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	355.840.273,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	-		500.000.000,00	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	649.960.100,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	-		0,00	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
	J U M L A H							20.956.835.877,00							28.342.599.406,00	

BAB V

PENUTUP

Uraian dan penjabaran yang telah tertuang didalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

- Secara Umum

Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara dibidang ketahanan pangan dan pertanian yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

- Secara Khusus

Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 merupakan proses berkelanjutan yang artinya perlu dikaji secara cermat berkesinambungan, maka diambil langkah strategis sebagai berikut :

- a. Mengajukan program secara formal terhadap Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025.
- b. Melakukan pengembangan perencanaan program pembangunan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI